



Bupati Kumpulkan Kepala Sekolah

■ Sepakat Tindak Tegas Pelaku Klitih

YOGYA, TRIBUN - Kasus kejahatan jalanan, termasuk yang dilakukan tanpa motif atau akrab disebut klitih terus menjadi pembicaraan hangat.

Berbagai gagasan mengemuka untuk memberantas kasus yang membuat para pengendara motor di malam hari merasa waswas.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai, sejauh ini aparat kepolisian telah berhasil membekuk sejumlah pelaku klitih.

Raja Keraton Yogyakarta ini pun menegaskan bahwa proses hukum untuk pelaku klitih akan terus ber-

lanjut sekalipun mereka masih anak-anak.

"Klitih kan orangnya juga sudah ditangkap, hanya nanti ada proses. Saya hanya ingin hukum itu ditegakkan, aturan itu sudah ada," ujar Sri Sultan HB X di kantor DPRD DIY, Jumat (8/4) lalu.

Selanjutnya Gubernur DIY mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait kejahatan jalanan ini ditujukan kepada para bupati dan wali kota.

Mereka diminta melibat-

● ke halaman 11



Klitih kan orangnya juga sudah ditangkap, hanya nanti ada proses. Saya hanya ingin hukum itu ditegakkan

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X



Setiap jam 10 malam orang tua harus melihat anaknya ada di mana. Jangan sampai mereka masuk geng

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih



Setiap keluarga harus bisa mengenali tempat dan teman bermain anak-anak. Harus dikontrol

Wawali Kota Yogya, Heroe Poerwadi



Kalau ada yang mencurigakan, tolong (masyarakat) segera melapor ke aparat

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta

FOTO : TRIBUNJOGJA/AYU/TRO/AKA/ALX

Bupati Kumpulkan

• Sambungan Hal 1

kan para tokoh masyarakat, agama, RW, RT dan lainnya untuk menyosialisasikan pentingnya setiap keluarga untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya.

Kemudian digelar berbagai aktivitas positif bagi remaja, mengaktifkan patroli oleh Linmas dan Jaga Warga, memonitoring bersama aparat terhadap aktivitas di malam hari dan menganggarkan dana untuk penanganan kejahatan jalanan.

Bupati dan Wali Kota pun langsung bergerak. Di Bantul misalnya, Forkopimda telah menggelar rapat terkait pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan pada Senin (11/4) lalu.

Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh kepala sekolah di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Bantul dalam memberikan pemahaman, pengawasan dan bimbingan kepada para siswa.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ditemui Selasa (12/4) mengatakan bahwa rapat Forkopimda kemarin adalah sebagai tindak lanjut arahan Gubernur DIY agar menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan aksi kriminal jalanan atau kejahatan jalanan.

"Kita sudah merencanakan rencana aksi, pertama kita akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah di tingkat SMP, MTS, SMA, SMA, MA, nanti nara sumbernya dari polisi untuk memberikan pemahaman pola kejahatan jalanan," ujar Bupati.

Jika memungkinkan, seluruh kepala sekolah akan dikumpulkan pada bulan puasa ini. Selanjutnya, bersama kepolisian pihaknya akan mengidentifikasi semua pelaku kejahatan jalanan.

"Data by name by address sudah ada di sekolah masing-masing, jadi untuk melihat mereka, mengenali mereka itu sangat mudah," imbuhnya.

Proses identifikasi ini se-

bagat langkah menggali latar belakang anak tersebut dan pola geraknya. Setelah itu komite sekolah akan berembus agar nama-nama anak yang berperilaku khusus tersebut dapat dilakukan pengawasan dan disadarkan.

"Harus dikembalikan kepada orang tua. Orang tua tidak boleh lepas tangan, harus terlibat. Maka kita mengimbau setiap jam 10 malam orang tua harus melihat anaknya ada di mana. Jangan sampai mereka masuk geng yang ngak jelas itu, geng yang hanya melakukan kerusakan," tegasnya.

Selain itu, fungsi bimbingan-konseling di tiap sekolah harus lebih aktif dalam memberikan treatment kepada anak-anak dan memprioritaskan mereka agar tidak terjerumus lebih dalam di kegiatan-kegiatan negatif.

Selanjutnya Pemkab Bantul mendukung sepenuhnya patroli yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menginstruksikan Satpol PP dan OPD terkait untuk ikut serta dalam monitoring tersebut.

"Penegakan hukum jalan terus. Malah Ngarsa Dalam mengatakan, walaupun anak-anak ya harus ditindak, karena sudah membahayakan. Memang anak-anak itu tidak boleh dipidana layaknya orang dewasa, tapi ketika mereka sudah melakukan tindakan yang membahayakan ya harus ditangkap, harus dihukum, tentu dengan hukuman anak yang berbeda dengan hukuman orang dewasa," terangnya.

"Tetap kita sepakat kalau ada kejahatan jalanan siapapun tetap ditindak," pungkasnya.

Kontrol aktivitas

Di Kota Yogyakarta, perangkat wilayah tingkat kampung di Kota Yoga diminta untuk terus mengontrol aktivitas warga masyarakatnya, khususnya generasi muda.

Segala gerak-gerik mencurigakan harus diwaspadai, untuk menekankan potensi kejahatan jalanan yang kini marak terjadi.

Wakil Wali Kota Yogyakarta,

Heru Poerwadi mengatakan, pengurus RT maupun RW di perkampungan harus punya kesadaran terkait pengawasan tersebut.

Menurutnya, jangan sampai masyarakat tak menyadari, atau malah membiarkan adanya potensi bibit kriminalitas di lingkungannya.

"Makanya, itu harus rutin dilakukan, sosialisasikan pada seluruharganya," kata Heru, Rabu (13/4).

Ia menekankan pada perangkat wilayah, supaya menjalin koordinasi intensif dengan penduduk yang memiliki anggota keluarga berusia remaja.

Sebab, di tengah situasi seperti ini, keluarga harus mengetahui aktivitas dan pergaulan kerabat remajanya, agar terhindar dari kejahatan jalanan.

"Setiap keluarga harus bisa mengenali tempat dan teman bermain anak-anak, atau kerabat mereka, ya, terutama ketika keluar malam hari. Harus dikontrol," urai Wawali.

Selain untuk mengawasi pergaulan anak, ini kan sekaligus melindungi, supaya mereka tidak terjebak dalam situasi dan kondisi yang bisa berakibat bahaya," tambahnya.

Lebih lanjut, Heru menyampaikan, Pemkot Yoga sudah menjalin sinergi dengan aparat TNI dan Polri, untuk upaya-upaya monitoring selepas pukul 24.00 WIB. Dengan sasaran, kumpulan-kumpulan anak muda.

"Kita harus pastikan kejahatan jalanan tidak terjadi lagi. Semoga ikhtiar untuk menyadarkan, mendidik, membina, serta mengondisikan membawakan hasil, menghentikan kejadian serupa di masa depan," tandasnya.

Peran aktif

Bupati Gunungkidul Sunaryanta turut menanggapi maraknya aksi kejahatan jalanan akhir-akhir ini. Apalagi belum lama ini, puluhan remaja diamankan lantaran berencana melakukan aksi perang sarung.

Sunaryanta mengatakan peran aktif dari masyarakat diperlukan untuk menekan

potensi aksi kejahatan jalanan tersebut.

"Kalau ada yang mencurigakan, tolong (masyarakat) segera melapor ke aparat," kata Sunaryanta, Rabu (13/4).

Sunaryanta juga meminta warganya untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Pada sisi lain, ia menjamin upaya pencegahan sudah dilakukan oleh aparat lewat kegiatan patroli.

Wakapolres Gunungkidul Kompol Widya Mustikaningrum mengharapkan peran dari para orang tua. Antara lain lebih meningkatkan pengawasan pada anak-anaknya.

"Mohon bantuannya agar anak-anak pukul 22.00 WIB sudah berada di rumah," kata Widya.

Menurutnya, upaya penyuluhan pada masyarakat kini lebih digencarkan lewat bhabin-kamtibmas tiap wilayah. Patroli rutin pun saat ini juga ditingkatkan bersama tim gabungan.

Widya juga menyebut pemantauan dilakukan hingga ke media sosial. Para pelaku nantinya akan ditindak secara hukum, namun ia mengatakan tindakan itu sebagai opsi terakhir.

"Jika terpaksa akan ada tindakan hukum, namun kami harap itu tidak terjadi," ujarnya.

Belum lama ini, Polres Gunungkidul menggaungkan rencana aksi perang sarung yang hendak dilakukan oleh puluhan remaja. Sebagian besar di antara mereka masih di bawah umur.

Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Mahardian Dewo Negoro mengatakan seluruh pelaku yang terlibat hanya mendapat pembinaan. Alasannya, aksi perang sarung tersebut baru sebatas rencana.

"Ada yang sudah terjadi, tapi tidak ada korban luka," kata Mahardian.

Sebanyak 21 pelaku aksi perang sarung kini hanya dikenakan wajib lapor seminggu 2 kali. Proses pembinaan ini juga akan melibatkan orang tua para pelaku. (tro/nto/aka/als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005